



Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum (Studi Kasus: Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018)

Helen NM Napitupulu

Akademi Maritim Belawan (AMB) Medan
helennovera72@gmail.com

Ade Irma Sagala

Akademi Maritim Belawan (AMB) Medan
adeirma.sagala@gmail.com

Abstract

Simultaneous regional elections held in 2018 in 171 regions in Indonesia recorded voter reached 73.24% of the total permanent voters list (DPT) available. There has been a decrease in the level of community participation if compared to the 2017 elections which reached 74% (source: KPU Data) become a matter of concern so that it does not continue to occur in every general election. One method used is through citizenship education. This study aims to determine whether citizenship education for beginner voters can already be used as a basis in understanding and interpreting the general election and is there a significant effect of citizenship education on the increase in the participation of beginner voters in general elections. From the research conducted on 200 adolescent voters in 3 senior high schools and 2 universities in Medan took a case study on the election of the Governor and Deputy Governor of North Sumatra in 2018. Final result showing that there was a strong correlation between citizenship education and the level of participation of beginner voters in general election. when the citizenship education is received better by the beginner voters , then the level of participation in the election become higher.

Keywords: *Citizenship Education, General Election, Beginner Voter Participation*

Abstrak

Pilkada serentak yang dilaksanakan pada Tahun 2018 di 171 daerah di Indonesia mencatat partisipasi pemilih yang mencapai 73,24 % dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada. Terjadinya penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu jika dibanding Pilkada Tahun 2017 yang mencapai 74 % (sumber : Data KPU) menjadi hal yang perlu diwaspadai agar tidak terus terjadi dalam setiap perlehatan pemilihan umum. Salah satu cara yang digunakan untuk mendongkrak tingkat partisipasi pemilih terutama pemilih pemula adalah melalui pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah Pendidikan kewarganegaraan bagi Pemilih Pemula sudah dapat dijadikan dasar dalam memahami dan memaknai Pemilihan umum serta adakah Pengaruh signifikan perolehan Pendidikan kewarganegaraan terhadap peningkatan partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Penelitian yang dilakukan terhadap 200 orang di 3 Sekolah Menengah Atas dan 2 Perguruan Tinggi di Kota Medan ini mengambil studi kasus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan adanya Pengaruh yang signifikan dari Pendidikan Kewarganegaraan terhadap peningkatan partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan umum dimana semakin baik Pendidikan Kewarganegaraan yang diterima oleh Pemilih Pemula maka tingkat Partisipasinya pada pemilu juga akan semakin tinggi.

Kata kunci: *Pendidikan Kewarganegaraan, Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih Pemula*



I. Pendahuluan

Salah satu hal penting pada era demokrasi saat ini adalah membangun konsep partisipasi politik masyarakat. Untuk berdiri dan berkembangnya bangunan demokrasi maka partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu prasyarat. Itulah sebabnya sedapat mungkin negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, melalui perangkat-perangkatnya selalu berusaha untuk meningkatkan partisipasi politik warga negaranya. Partisipasi politik masyarakat (pemilih) yang digunakan untuk mengukur kualitas pemilihan umum menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu tetapi lebih daripada itu adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama seluruh warga negara.

Meningkatnya jumlah masyarakat yang a-politis yang ditandai dengan tingginya angka GOLPUT atau golongan putih pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum patut diwaspadai. GOLPUT adalah golongan masyarakat yang tidak ikut memilih, meskipun memiliki hak pilih. Dari data KPU, PEMILU tahun 1955 mencatat angka golput sebanyak 8,6 % dan 91,1 % partisipasi Pemilih, Tahun 1971 angka golput mengalami penurunan ke angka 3,4 %. Kemudian pada PEMILU berikut angka Golput kembali meningkat, di Tahun 1999 terdapat pemilih 92,6 % dan Golput sebanyak 7,3 %, Pemilu Tahun 2004 ada 84,1 % Partisipasi Pemilih dengan angka golput sebesar 15,9 %. Peningkatan jumlah Golput semakin besar pada PILPRES Tahun 2004 yaitu mencapai angka 23,34 % dengan partisipasi pemilih hanya 76,6 %. Selanjutnya pada PEMILU Legislatif Tahun 2009 tingkat partisipasi Pemilih semakin menurun dan hanya mencapai 70,9 % dan jumlah Golput semakin tinggi hingga mencapai 29,1 %.

Pada PEMILU Tahun 2014 berdasarkan Survey dari CSIS dan lembaga Survey Cyrus Network tingkat Golput hampir mencapai angka 25 %, yaitu tepatnya di angka 24,8 % dengan tingkat partisipasi pemilih hanya 75,2 %. Kemudian tingginya angka golput terus meningkat hingga pada PILKADA serentak tahun 2015 yang lalu. Angka Golput mencapai 30 % dengan tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 70 %. Bahkan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 angka Golput sangat tinggi hingga 74,44 % dari DPT. Angka itu melebihi angka partisipasi pemilih yang hanya mencapai angka 25,5 % (Data KPU Medan).

Sikap apolitis masyarakat dipicu oleh banyak faktor, diantaranya meningkatnya kecenderungan penggunaan cara-cara tidak demokratis dalam berpolitik yang dipraktekkan dan dipertontonkan oleh elit-elit politik di negara ini menjadi salah satu pendorong tumbuhnya sikap apatis masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Selain itu hilangnya rasa percaya dan harapan akan perubahan ke arah yang lebih baik juga dirasakan oleh sebagian masyarakat yang menolak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hal tersebut diperparah lagi dengan lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*). Sehingga akan menjadi keniscayaan proses penegakan demokrasi bergerak ke arah yang lebih baik, apabila angka golput dan masyarakat apolitis dibiarkan terus meningkat dari pemilu ke pemilu.

Menurut Azyumardi Azra (2016:vi), pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis menjadi salah satu kondisi yang ingin dituju oleh negara yang menganut paham demokrasi termasuk Indonesia. Upaya itu harus dilakukan



dengan melibatkan semua segmen masyarakat termasuk generasi muda (Pemilih pemula), dan upaya yang paling tepat untuk melakukan hal tersebut adalah melalui proses pendidikan demokrasi. Secara substantif, pendidikan demokrasi meliputi sosialisasi, diseminasi, aktualisasi dan implementasi konsep, sistem, nilai dan praktek demokrasi melalui pendidikan.

Melalui jalur pendidikan proses berdemokrasi telah diperkenalkan kepada warganegara terutama kaum muda. Pendidikan Kewarganegaraan yang sebagian dari muatan pembelajarannya adalah pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia menjadi mata pelajaran dan mata kuliah wajib dalam setiap tingkat pendidikan formal di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan dengan pola pembelajaran yang humanis dan demokratis sangat dibutuhkan di tengah *urgency* demokrasi saat ini, dimana nilai-nilai dan prinsip demokrasi dapat dipraktekkan langsung di ruang kelas atau perkuliahan. (Agus Sarwo Prayogi, 2018:9).

Dalam makalahnya J.W.Batawi (2013) menyampaikan bahwa pembelajaran demokrasi di lingkup sekolah dapat meningkatkan kemampuan siswa menganalisis isu-isu demokrasi yang muncul di masyarakat menambahkan kemampuan nalar siswa dalam pengetahuan kemasyarakatan (*socio-scientific reasoning*), mengembangkan keterampilan berpikir (*higher-order thinking skill*), termasuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, membuat menganalisis dan kritis, mengembangkan kesadaran peran siswa dalam proses perubahan demokrasi, membantu siswa mengakui kompleksnya dari membuat keputusan masalah demokrasi, menyediakan kesempatan siswa untuk menguji kemungkinan dampak demokrasi bagi kehidupan dan perubahan masyarakat.

Tujuan pendidikan demokrasi memang bukan terletak pada struktur organisasi yang tersusun bagus dan indah, tetapi bagaimana pertumbuhan warganegara dalam mencapai penentuan dirinya sendiri. Melalui demokrasi setiap orang mendapat tempat dalam proses pemanusiaan yang demokratis seperti yang disampaikan oleh Tuswoyo dalam buku Teori-teori Demokrasi yang ditulis oleh Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah dan diterbitkan oleh Pustaka Setia, Bandung (2013 : 6).

Berangkat dari kegelisahan dan keinginan untuk memperbaiki citra demokrasi dan memutus mata rantai sikap apolitis masyarakat terutama generasi muda (pemilih pemula) maka perlu dikaji dan diuji apakah ada dampak signifikan perolehan pendidikan kewarganegaraan terhadap keinginan dan minat generasi muda khususnya Pemilih Pemula untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses pemilihan umum di negeri ini. Apakah pendidikan kewarganegaraan yang selama ini diperoleh telah mampu menumbuhkan kesadaran positif generasi muda khususnya pemilih pemula dalam memaknai pemilu. Apakah pemilih pemula telah menyadari bahwa pemilihan umum digelar dengan tujuan untuk perubahan kebijakan dan mekanisme politik yang lebih baik dengan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap nusa dan bangsanya.

A. Tinjauan Pustaka

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Zamron (Hamid & Lutfi, 2010: 17) menerangkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktifitas penanaman kesadaran kepada



generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Melalui pendidikan Kewarganegaraan yang mempelajari sikap, orientasi dan prilaku politik akan menjadikan seseorang memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy*, dan *political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik.

Sejalan dengan hal tersebut, (Prayogi (2018: 9) menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk pribadi yang cerdas sehingga menjadi aktif dan lebih bermartabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan sangat dibutuhkan di tengah *urgency* demokrasi saat ini, dimana nilai-nilai dan prinsip demokrasi dapat dipraktikkan langsung di ruang kelas atau perkuliahan

B. Partisipasi Politik

Partisipasi publik merupakan salah satu elemen dasar dalam demokrasi. Kacung Marijan (2010: 112 – 113) di dalam demokrasi perwakilan partisipasi itu lebih dimaksudkan sebagai keterlibatan warganegara di dalam pemilu. Partisipasi dan Kontestasi yang dianggap sebagai syarat minimal demokrasi yang pada akhirnya membuka kesempatan pada sistem pemilu yang bebas dan adil serta terbukanya keran sistem multi partai. Melalui kedua hal tersebut menurut Kacung Marijan (2010: 118) merupakan instrumen yang paling mendasar bagi upaya untuk membangun sistem keterwakilan politik yang lebih baik. Kedua hal tersebut juga dapat membuka ruang yang lebih besar kepada warga negara untuk terlibat aktif di arena politik.

Menurut Miriam Budiarto (2008), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau suatu kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam suatu kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pemerintah. Miriam Budiarto juga menyatakan bahwa partisipasi politik yang baik (*legal*) adalah partisipasi murni warga negara yang tumbuh karena timbulnya kesadaran dan bukan karena paksaan. Karena partisipasi politik merupakan cerminan dari sikap politik (*political behavior*) warga negara yang berwujud dalam perilaku baik secara psikis maupun secara fisik. Perilaku politik tersebut kemudian mengkristal dalam wujud partisipasi politik yang berlangsung secara konvensional sebagai suatu keharusan yang berada dalam setiap sistem.

C. Pemilihan Umum dan Pemilih Pemula

Ikut serta dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik minimal warga negara. Melalui pemilihan umum warga negara memilih para wakil yang akan duduk di lembaga-lembaga perwakilan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberi pengertian Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan hal tersebut A.Ubaedillah (2016: 95-96) menyatakan bahwa pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan dimana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di



parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman.

Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara seperti yang disampaikan oleh Miriam Budiarmo dalam Jurnal Ilmu Politik No.10 Tahun 1990 hal.37 yang berjudul Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global.

Sebagai bagian dari masyarakat, Pemilih Pemula mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya dengan pemilih lainnya. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan telah memenuhi syarat yaitu berumur diatas 17, sudah atau pernah menikah ataupun telah purnawirawan atau tidak lagi menjadi anggota TNI/Polri. Pemilih Pemula yang mayoritas Pelajar (SMA), mahasiswa dan pekerja muda merupakan pemilih yang potensial dalam perolehan suara pada setiap perolehan Pemilihan Umum.

Bagi Pemilih pemula, Pemilihan umum merupakan sarana untuk memperoleh pendidikan politik yang bermanfaat untuk mencerdaskan, melatih dan membangun kesadaran politik sejak dini. Pemilihan umum juga dipahami sebagai media untuk ikut berperan dalam proses demokrasi, karena suara yang mereka berikan merupakan wujud kerjasama dalam menyukseskan pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan demokrasi. Sementara bagi penyelenggaraan pemilihan umum keterlibatan dan partisipasi Pemilih Pemula sebagai dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Pemilihan umum.

II. Metode Penelitian

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif-kuantitatif*, Analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap partisipasi Pemilih Remaja (Pemula). Sedangkan hasil pengukuran proses dari pelaksanaan pemilihan umum yang dimaknai oleh pemilih pemula akan digunakan metode deskriptif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan, dengan melakukan pengamatan, survei, dan menyebar kuesioner kepada Siswa/i di Kelas XII dan Mahasiswa/i yang telah mengikuti pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal penelitian dan dokumen yang diperlukan dalam penyusunan penelitian berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi pemilih pemula.

B. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, dan harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis merupakan pernyataan sederhana mengenai suatu harapan peneliti tentang hubungan antar variabel dalam masalah (Nyoman Dantes, 2012: 28).

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis :

H₀ : Tidak terdapat (tidak ada) hubungan yang signifikan antara pendidikan kewarganegaraan terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula



H_a : Terdapat (ada) hubungan yang signifikan antara pendidikan kewarganegaraan terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula

C. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menganalisis data – data yang dikumpulkan guna menuju tahap berikutnya guna mencari hasil. Dalam Penelitian ini menggunakan dengan:

1. Metode yang digunakan skala pengukuran model Likert Scale (skala Likert) dengan rentang skala 1 sampai dengan 5, seperti berikut : nilai 1 untuk “*sangat tidak setuju*”, nilai 2 untuk “*tidak setuju*”, nilai 3 untuk “*netral*”, nilai 4 untuk “*setuju*” dan nilai 5 untuk “*sangat setuju*”. Kemudian hasil kuesioner akan dibandingkan dengan nilai normal untuk menilai kekuatan dan kelemahan karakter demokrasi pada siswa/i dan mahasiswa/i sebagai pemilih pemula. Sedangkan proses pelaksanaan pengajaran akan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan antara proses kerja dengan teori yang ada untuk memperoleh kesimpulan dan saran yang kompetibel dengan permasalahan yang ada.
2. Uji Validitas Instrumen
Uji validitas digunakan untuk mengukur kevalidan atau kesahihan suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui pernyataan tersebut valid atau tidak valid dengan pedoman jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ pada signifikan 5% maka pernyataan valid. Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka pernyataan tidak valid (Arikunto,2013).
3. Uji Realibilitas
Reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Uji reliabilitas merupakan uji keandalan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. Keandalan berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur, apabila dilihat dari stabilitas atau konsisten internal dari jawaban atau pertanyaan jika pengamatan dilakukan secara berulang. Apabila suatu alat ukur ketika digunakan secara berulang dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur tersebut handal dan reliable.
4. Korelasi Somer’s D
Pengujian signifikansi dan hubungan antar variabel pada penelitian ini menggunakan analisis korelasi. Analisis korelasi yang umumnya digunakan adalah analisis korelasi *Pearson*, *Kendall’s Tau b*, *Spearman*, dan *Somer’s D*. Analisis korelasi *Pearson* adalah analisis korelasi parametrik yang mengharuskan data berdistribusi normal. Sementara analisis *Kendal’s Tau b*, *Spearman*, dan *Somer’s D* adalah analisis korelasi nonparametrik yang tidak mengharuskan data berasal dari distribusi normal. Karena data pada penelitian ini berskala ordinal, maka dapat dipastikan bahwa data tidak berdistribusi normal. Sehingga metode analisis korelasi yang digunakan harus korelasi nonparametrik. Korelasi *Somer’s D* merupakan korelasi nonparametrik yang tepat digunakan untuk menganalisis suatu hubungan diantara dua variabel yang memiliki skala data ordinal.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pengujian Kuesioner

1) Uji Validitas

Nilai r_{tabel} untuk jumlah responden 200 dan tingkat signifikansi 5% adalah 0,138.



Uji validitas

Variabel	Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula (Y)	Indikator 1	0,675	0,138	Valid
	Indikator 2	0,628	0,138	Valid
	Indikator 3	0,791	0,138	Valid
	Indikator 4	0,725	0,138	Valid
	Indikator 5	0,741	0,138	Valid
	Indikator 6	0,707	0,138	Valid
	Indikator 7	0,747	0,138	Valid
	Indikator 8	0,493	0,138	Valid
	Indikator 9	0,677	0,138	Valid
	Indikator 10	0,543	0,138	Valid
Pendidikan Kewarganegaraan (X)	Indikator 1	0,771	0,138	Valid
	Indikator 2	0,877	0,138	Valid
	Indikator 3	0,884	0,138	Valid
	Indikator 4	0,813	0,138	Valid
	Indikator 5	0,806	0,138	Valid

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa untuk semua indikator yang mengukur variabel tingkat partisipasi pemilih pemula (Y) dan variabel pendidikan kewarganegaraan (X) adalah valid. Hal ini dikarenakan nilai r_{hitung} untuk setiap indikator lebih dari nilai r_{tabel} yang digunakan.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas kuesioner dimaksudkan untuk mengetahui kekonsistenan kuesioner dalam mengumpulkan data penelitian. Indeks reliabilitas berkisar antara 0-1. Semakin tinggi koefisien reliabilitas suatu tes (mendekati 1), makin tinggi pula ketepatannya.

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien <i>Cronbach Alpha</i>
Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula (Y)	0,861
Pendidikan Kewarganegaraan (X)	0,882

Berdasarkan tabel diperoleh nilai reliabilitas untuk setiap variabel. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan koefisien *cronbach alpha*. Nilai koefisien *cronbach alpha* untuk tingkat partisipasi pemilih pemula (Y) dan pendidikan kewarganegaraan secara berturut-turut adalah 0,861 dan 0,882. Secara umum jika nilai



reliabilitas (koefisien nilai koefisien *cronbach alpha*) > 0,8 maka reliabilitas dari variabel pada kuesioner tersebut masuk kepada kategori reliabilitas tinggi. Artinya indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pada kuesioner ini sudah reliabel.

B. Pengkategorian Data

Pengkategorian data dilakukan untuk melihat kecenderungan dari masing-masing variabel.

Pedoman Pengkategorian Skor

Rentang Skor	Kategori
$X_i < (Mi - 1.SDi)$	Sangat Rendah
$(Mi - 1.SDi) \leq X_i < Mi$	Rendah
$Mi \leq X_i < (Mi + 1.SDi)$	Tinggi
$X_i \geq (Mi + 1.SDi)$	Sangat Tinggi

Dimana, Mi merupakan nilai mean ideal dan SDi adalah standar deviasi ideal. Nilai Mi dan Sdi secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Mi = \frac{1}{2}(\text{Skor tertinggi} + \text{Skor terendah})$$

$$SDi = \frac{1}{6}(\text{Skor tertinggi} + \text{Skor terendah})$$

1) Pengkategorian variabel tingkat partisipasi pemilih pemula (Y)

Berdasarkan 10 pernyataan yang ada dengan jumlah responden 200 siswa, menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi pemilih pemula memiliki skor tertinggi sebesar 50 yang diperoleh dari $(5 \times 10) = 50$ dan skor terendah 10 yang diperoleh dari $(1 \times 10) = 10$. Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi) untuk variabel tingkat partisipasi pemilih pemula adalah sebagai berikut.

$$Mi = \frac{1}{2}(50 + 1) = 30$$

$$SDi = \frac{1}{6}(50 + 10) = 10$$

Berdasarkan nilai Mi dan SDi tersebut, maka diperoleh kategori untuk variabel tingkat partisipasi pemilih pemula (Y) dengan jumlah kategori adalah 4 sebagai berikut:

$$\text{Sangat rendah} = Y < (Mi - 1.SDi)$$

$$= Y < (30 - 10)$$

$$= Y < 20$$

$$\text{Rendah} = (Mi - 1.SDi) \leq Y < Mi$$

$$= (30 - 10) \leq Y < 30$$

$$= 20 \leq Y < 30$$

$$\text{Tinggi} = Mi \leq Y < (Mi + 1.SDi)$$

$$= 30 \leq Y < (30 + 10)$$



$$= 30 \leq Y < 40$$

$$\begin{aligned} \text{Sangat Tinggi} &= Y \geq (Mi + 1.SDi) \\ &= Y \geq (30+10) \\ &= Y \geq 40 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuat distribusi frekuensi kecenderungan tingkat partisipasi pemilih pemula (Y) sebagai berikut:

Distribusi frekuensi kecenderungan tingkat partisipasi pemilih pemula

No.	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi	Persen (%)
1	$Y < 20$	Sangat Rendah	1	0,5
2	$20 \leq Y < 30$	Rendah	2	1
3	$30 \leq Y < 40$	Tinggi	87	43,4
4	$Y \geq 40$	Sangat Tinggi	110	55
Jumlah			200	100

Berdasarkan Tabel frekuensi kecenderungan variabel tingkat partisipasi pemilih pemula cenderung berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Dari 200 responden, 87 responden (43,4%) berada pada kategori tinggi dan 110 responden (55%) berada pada kategori sangat tinggi, sementara sisanya berada pada kategori rendah dan sangat rendah.

2) Pengkategorian variabel pendidikan kewarganegaraan (Y)

Berdasarkan 5 pernyataan yang ada dengan jumlah responden 200 siswa, menunjukkan bahwa variabel pendidikan kewarganegaraan memiliki skor tertinggi sebesar 25 yang diperoleh dari $(5 \times 5) = 25$ dan skor terendah 5 yang diperoleh dari $(1 \times 5) = 5$. Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi) untuk variabel pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

$$Mi = \frac{1}{2}(25 + 5) = 15$$

$$SDi = \frac{1}{6}(25 - 5) = 5$$

Berdasarkan nilai Mi dan SDi tersebut, maka diperoleh kategori untuk variabel pendidikan kewarganegaraan (X) dengan jumlah kategori adalah

$$\begin{aligned} \text{Sangat buruk} &= X < (Mi - 1.SDi) \\ &= X < (15 - 5) \\ &= X < 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Buruk} &= (Mi - 1.SDi) \leq X < Mi \\ &= (15 - 5) \leq X < 15 \\ &= 10 \leq X < 15 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\text{Baik} &= Mi \leq X < (Mi + 1.SDi) \\ &= 15 \leq X < (15+5) \\ &= 15 \leq X < 20\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Sangat Baik} &= X \geq (Mi + 1.SDi) \\ &= X \geq (15+5) \\ &= X \geq 20\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuat distribusi frekuensi kecenderungan pendidikan kewarganegaraan (X) sebagai berikut:

Distribusi frekuensi kecenderungan pendidikan kewarganegaraan

No.	Rentang Skor	Kategori	Frekuensi	Persen(%)
1	$X < 10$	Sangat Buruk	1	0,5
2	$10 \leq X < 15$	Buruk	5	2,5
3	$15 \leq X < 20$	Baik	76	38
4	$X \geq 20$	Sangat Baik	118	59
Jumlah			200	100

Berdasarkan Tabel frekuensi kecenderungan variabel pendidikan kewarganegaraan cenderung berada pada kategori baik dan sangat baik. Dari 200 responden, 76 responden (38%) berada pada kategori baik dan 118 responden (59%) berada pada kategori sangat baik, sementara sisanya berada pada kategori buruk dan sangat buruk.

c. Uji Signifikansi dan Hubungan Antar Variabel

Metode analisis korelasi nonparametrik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis korelasi *Somer's D*. Analisis korelasi nonparametrik *Somer's D* digunakan karena skala data pada penelitian ini merupakan skala *ordinal by ordinal*. *Somer's D* juga mengukur hubungan antara dua variabel berskala ordinal yang dibentuk kedalam tabel kontingensi. Tabel kontingensi untuk kedua variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Tabel kontingensi tingkat partisipasi pemilih pemula dengan pendidikan kewarganegaraan.

		Kategori total pendidikan kewarganegaraan				Total
		Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik	
Kategori tingkat partisipasi pemilih pemula	Sangat Rendah	1	0	0	0	1
	Rendah	0	2	0	0	2
	Tinggi	0	2	64	21	87
	Sangat Tinggi	0	1	12	97	110
Total		1	5	76	118	200

Berdasarkan Tabel dapat diperoleh bahwa jumlah responden yang memiliki tingkat partisipasi pemilih pemula sangat rendah dengan pendidikan kewarganegaraan yang sangat buruk ada 1 responden. Sementara, jumlah responden yang memiliki tingkat partisipasi pemilih pemula sangat tinggi dengan pendidikan kewarganegaraan yang sangat baik ada 118 responden.

Nilai koefisien korelasi *Somer's D* dengan tingkat partisipasi pemilih pemula sebagai variabel dependen adalah 0,659. Sama halnya dengan koefisien korelasi lainnya, koefisien korelasi *Somer's D* juga berada pada rentang 0 sampai 1. Dimana jika koefisien semakin mendekati 1 maka hubungan antara kedua variabel semakin kuat. Koefisien 0,659 ini termasuk kedalam korelasi yang kuat karena nilainya lebih dari 0,5. Artinya hubungan antara variabel pendidikan kewarganegaraan dengan tingkat partisipasi pemilih pemula memiliki korelasi yang kuat. Tanda pada koefisien korelasi adalah positif, artinya semakin baik pendidikan kewarganegaraan maka tingkat partisipasi pemilih pemula juga akan semakin tinggi.

Untuk mengetahui interpretasi dari koefisien korelasi tersebut bermakna atau tidak, perlu dilakukan uji signifikansi korelasi. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah variabel pendidikan kewarganegaraan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula. Berikut adalah pengujiannya dengan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan kewarganegaraan terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula

H_a : Ada hubungan yang signifikan antara pendidikan kewarganegaraan terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula

Hipotesis ditolak jika nilai signifikan korelasi *Somer's D* $< \alpha$ (α) yang digunakan. Berdasarkan hasil pengujian korelasi *Somer's D* menggunakan *software* SPSS yang terlampir pada Lampiran 1. Bagian uji *Somer's D* diperoleh nilai signifikansi *Somer's D* sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi *Somer's D* (0,000) $< \alpha$ (0,05) maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pendidikan kewarganegaraan terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula.



d. Analisis Deskriptif Pemilih Pemula Memaknai Pemilihan Umum

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi seringkali digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk mengukur kuat tidaknya legitimasi politik para calon yang menjadi kontestan pemilihan umum tersebut. Oleh karena itu semakin rendah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum semakin rendah pula kualitas pemilihan tersebut. (Mahfud MD dalam buku *Demokrasi Lokal : Evaluasi Pemilukada di Indonesia, 2013 : 8*).

Dalam sejarah Pemilihan Umum di Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (*turn out*) masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih di negara-negara demokratis yang corak pemilunya pilihan (*optional*) dan bukan kewajiban (*compulsory*) seperti yang disampaikan oleh Marijan (210 : 125-126). Tetapi, jika dilihat hasil pemilihan umum dalam 10 tahun terakhir baik Pemilihan umum Presiden, pemilihan umum Legislatif maupun Pilkada terdapat kecenderungan meningkatnya para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau disebut dengan GOLPUT.

Tabel Tingkat Partisipasi Pemilih di Indonesia, 1997-2009

Tahun Pemilu	DPT	Suara sah	Tidak Hadir	GOLPUT	%
1997	124.740.987	112.991.150	11.749.837	11.749.837	9,42
1999	117.815.053	105.786.661	12.028.392	12.028.392	10,21
2004	148.000.369	113.462.414	23.580.030	34.537.995	23,34
2009	171.265.443	104.699.785	49.677.079	67.165.657	29,22

Sumber : Asfar, (2004 : 5); KPU

Dari hasil hasil penelitian tersebut dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan Marijan (2010 : 126) bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah lama menganut paham demokrasi, maka tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia memang masih cukup tinggi, namun akan menjadi ancaman bagi tegaknya demokrasi hingga tidak sampai pada kondisi yang disebut Antony Giddens sebagai ‘ironi demokrasi’.

Salah satu strategi yang dipilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam setiap perlehatan pemilihan umum adalah menggalakkan keikutsertaan kaum milenial yang jumlahnya cukup besar dari tahun ke tahun. Keterlibatan generasi Milenial atau biasa disebut Pemilih Pemula tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat di pundak merekalah nantinya seluruh proses bernegara dan berpolitik ini diwariskan.

Pemilihan umum (Pemilu) bagi Pemilih Pemula dimaknai sebagai proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilih pemula memahami dan meyakini bahwa melalui Pemilihan Umum dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan Adil akan membuka ruang bagi rakyat untuk menentukan pilihan siapakah pemimpin atau wakil rakyat yang sesuai dengan hati nurani.

Sebagai pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 para responden hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk



memberikan hak pilihnya secara sukarela dan tanpa paksaan, karena responden telah mengetahui arti penting keterlibatan (partisipasi) nya dalam proses pemilihan umum akan memberi pengalaman baru dan pengetahuan sejak dini tentang proses bernegara dan berpolitik. Pemahaman dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang dipraktekkan secara langsung sedikit banyaknya akan membangun pribadi yang kritis pada Pemilih Pemula. Belajar bertanggung jawab dengan pilihan sendiri serta dapat saling menghargai perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan diantara masyarakat merupakan hal-hal yang dapat dipraktekkan langsung oleh para responden sebagai Pemilih pemula.

Pengetahuan secara teoritis tentang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang selama ini diperoleh melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sejak dibangku sekolah dasar pada akhirnya dapat dipraktekkan secara langsung oleh para responden yang menjadi pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan terhadap 200 orang Pemilih Pemula di 3 Sekolah Menengah Atas dan 2 Perguruan Tinggi di Kota Medan, menunjukkan adanya pengaruh signifikan pendidikan kewarganegaraan terhadap partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum. Penelitian yang mengambil studi kasus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 ini menunjukkan terdapat hubungan antara variabel Pendidikan Kewarganegaraan dengan tingkat Partisipasi Pemilih Pemula serta memiliki korelasi yang kuat. Oleh karena terdapat koefisien 0,659 dan termasuk ke dalam korelasi yang kuat (karena nilainya lebih dari 0,5) maka tanda pada koefisien korelasi adalah *positif*, artinya semakin baik Pendidikan Kewarganegaraan yang diterima oleh Pemilih Pemula maka tingkat Partisipasi Pemilih Pemula juga akan semakin tinggi. Setelah dilakukan dilakukan uji signifikansi korelasi *Somer's D* menggunakan *software* SPSS diperoleh nilai signifikansi *Somer's D* sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi *Somer's D* (0,000) $< \alpha(0,05)$ maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara Pendidikan Kewarganegaraan terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum.

B. Saran:

Setelah mengetahui hasil penelitian ini, maka disarankan agar lembaga pendidikan dapat mengevaluasi dan melakukan kaji ulang terhadap silabus dan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terutama untuk memperkaya materi dan pemahaman tentang Pemilihan Umum yang selama ini hanya menjadu sub pokok bahasan dari Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Bahkan jika memungkinkan Pemilihan umum dapat dijadikan salah satu mata pelajaran dan atau mata kuliah tersendiri (khusus) mengingat pemilihan umum adalah agenda politik dan bernegara di Indonesia yang dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta





- Azra, Azyumardi. 2016. *Transformasi politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, Jakarta: PPMI dan UIN Jakarta
- Batawi, J.W. 2013. *Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam PILKADA*, Jurnal UNIERA-Volume 2 Nomor 2, ISSN : 2086-0404
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia
- Budiarjo, Miriam. 1990. *Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global*, Jurnal Ilmu Politik, No.10
- Dantes Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset
- Dodi Achmad. 2013. *Demokrasi Lokal – Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Jakarta: Konpress
- Hamid dan Lutfi, J. 2010. *Civic Education antara Realitas Politik dan Implementasi Hukum*. Jakarta: Gramedia
- Huntington., Samuel., dan Joan Nelson, 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mardapi, D. 2008. *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes*, Yogyakarta: Mitra Cendekia Press.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia-Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Pranadamedia Group
- Martini Eneng, dkk. 2018. *Pengaruh Pendidikan Politik terhadap kesadaran partisipasi Pemilih Pemula di SMK PGRI 1 Cimahi Jawa Barat*, Jurnal Volume 2, Nomor 1, ISSN 2337-8891, IKIP PGRI Pontianak.
- Mufti, Muslim dan Durrotun Didah Naafisah. 2013, *Teori-teori Demokrasi*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Sarwo, Agus Prayogi. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi: Membangun Bangsa melalui koridor nilai-nilai pendidikan dasar*. Yogyakarta: Pustaka baru.
- Triana, Rita, Budiarti (Editor). 2013, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press
- Ubaedillah A. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta Pranadamedia Group
- Ubaedillah A., dan Rozak Abdul. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*;